

# Belajar Dari Bencana

Oleh **Abbas Ali**

**KEHIDUPAN** kita diwarnai oleh hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kedua hal yang bertentangan itu dapat berpengaruh ke arah kebaikan, tergantung bagaimana kita menyikapinya.

Kadangkala proses pembelajaran melahirkan bencana. Kesusahan yang dialami atau bencana sebagai akibat dari kesalahan, justru dapat meningkatkan kualitas diri. Namun demikian, tentu amat sedikit orang yang merencanakan bencana agar sesuatu pelajaran lebih mendapat perhatian. Yang sedikit itu adalah orang-orang yang keterlaluan.

Mereka itu termasuk yang merencanakan tindakan anarkis ketika terjadi demo mahasiswa menentang kebijakan Presiden Soeharto pada bulan Januari 1974. Pada waktu itu demo mahasiswa yang bergerak dari Kampus Trisakti menuju Universitas Indonesia di Salemba disabotase dengan tindakan pengrusakan mobil-mobil buatan Jepang dan pembakaran sejumlah gedung oleh orang-orang yang tidak dikenal. Menurut isu yang kebenarannya belum pernah dibuktikan, rekayasa itu berasal dari orang-orang yang sedang berkuasa atau mempunyai hubungan yang dekat dengan penguasa untuk membungkam gerakan mahasiswa dan sekaligus untuk memberi "pelajaran" kepada siapa saja yang mau menentang pemerintah. Tindakan anarkis itu menggagalkan gerakan mahasiswa. Sejumlah pemimpin mahasiswa akhirnya ditangkap dan belasan mass media pers yang bersuara vokal diberangus.

Perekayasa tindakan anarkis berupa pengrusakan, perampokan massal, dan pelecehan seksual juga muncul sekitar bulan Mei tahun 1998. Mereka membonceng gerakan reformasi yang dimotori oleh Amien Rais yang mengakibatkan kejatuhan Presiden Soeharto. Apakah perekayasa tindakan anarkis itu tunggal, satu unsur, atau beberapa unsur, tidak pernah terungkap dengan jelas. Maka menjadi tidak jelas pula, bencana itu direkayasa oleh siapa dan untuk "pelajaran" siapa. Yang diketahui bencana itu mengungkapkan beberapa hal penting di antaranya menggambarkan bahwa rakyat Indonesia banyak yang



miskin, penganggur, menyimpan rasa dendam dan irihati, moral jelek, para pemimpin tidak berwibawa, dan aparat keamanan lupa.

Bencana sebesar apapun tentu mengandung hikmah bagi banyak pihak. Hanya para pemimpin seperti George Bush dan Tony Blair

yang tidak mampu mengambil hikmah dari kekalahan pasukan Amerika yang sangat memalukan di Vietnam sekitar 30 tahun yang lalu. Keserakahan, keangkuhan dan dendam mendorong Bush dan kroninya merencanakan dan membuat bencana di Irak. Untuk bangsa Irak sajakah bencana itu? Jawaban itu sampai kini belum dapat diberikan secara tuntas. Ternyata bencana yang direkayasa oleh Amerika itu tidak mematikan semangat bangsa Irak. Bencana itu juga untuk Amerika Serikat. Insya Allah, bencana bagi pasukan Amerika di Irak makin lama makin besar, sehingga dapat berakhir dengan pemberian "pelajaran" terbesar oleh rakyat Irak kepada Amerika seperti orang-orang Vietnam memberi "pelajaran" serupa pada tahun 1970-an.

Dalam lingkup lokal, maka tersebutlah para anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang ramai-ramai merencanakan keberuntungan, bukan bencana. Akan tetapi buahnya ternyata berupa bencana bagi mereka masing-masing dan keluarganya. Sebanyak 43 orang anggota legislatif itu dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Padang. Tiga orang yang menempati posisi Pimpinan Dewan dihukum 27 bulan, sedangkan 40 orang yang menjadi anggota dihukum 2 tahun. Kesemuanya terkena denda dan mengganti uang yang diambil.

Apa pasal mereka itu ramai-ramai dihukum?

Awalnya adalah inisiatif beberapa orang. Yang lain-pun, entah karena lugu atau ikut-ikutan, menyertuinya. Maka terlibatlah hampir semua anggota Dewan dalam rekayasa pengeluaran Dewan yang pada dasarnya merupakan kiat untuk membagi-bagi uang untuk masing-masing anggota. Perbuatan itu bukan hanya dinilai oleh hakim sebagai telah melanggar Peraturan Pemerintah yang membatasi pengeluaran Dewan sampai jumlah tertentu, tetapi juga dinilai sebagai perbuatan korupsi. Akibat perbuatan mereka itu, Daerah dirugikan enam milyar kurang seratus juta.

Vonis hakim rupanya menyentak perasaan wakil-wakil rakyat yang juga mewakili berbagai partai politik itu, sehingga ada yang menangis tersedu-sedu menyambut ketukan palu hakim. Kasihan.

Pengalaman seperti di Sumbang itu rupanya juga terjadi di beberapa daerah-daerah lain. Ada yang diungkap ke publik, bahkan sampai ke pengadilan, ada yang tidak. Ada fenomena yang menunjukkan adanya upaya pengumpulan uang oleh para anggota Dewan. Ada apa sebenarnya? Moral anggota Dewan pada umumnya jelekkan?

Sulit menyampingkan aspek moral jelek dalam kasus itu, tetapi juga jangan lupa ada dorongan dan kesempatan yang diciptakan oleh suatu sistem.

Kita semua maklum bahwa orang-orang yang terpilih menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang banyak mengeluarkan uang pada masa kampanye Pemilu. Mereka harus menyeter dana untuk partai, menyumbang sejumlah atribut partai, membuat brosur, dan membagi "sedekah politik" untuk rumah ibadah dan orang miskin serta orang-orang yang berpengaruh. Biaya yang dikeluarkan dalam kampanye tahun 1999 ingin diganti, sementara mereka harus menyiapkan dana yang lebih besar lagi menghadapi Pemilu tahun 2004. Yang banyak mempunyai dana, mempunyai peluang besar untuk terpilih lagi.

Bagi mereka yang sudah diangkat menjadi anggota Dewan, keperluan pendanaan itu dapat mendorong mereka untuk mengkomersilkan jabatan. Jika mitra

kerja merupakan "lahan kering", maka akal-akalan dalam pengelolaan dana APBD timbul. Otoritas berlebihan yang diberikan oleh UU No. 22/1999 yang memberi hak kepada DPRD untuk menentukan anggarannya sendiri memberi peluang kepada anggota Dewan untuk merekayasa berbagai kepentingannya secara formal dalam bahasa anggaran.

Dengan demikian, para anggota Dewan itu pada dasarnya adalah juga korban dari suatu sistem yang kurang baik. Korban serupa dapat dicari pada jajaran lain misalnya kepolisian. Korban yang nampak, yang paling mutakhir, adalah mahasiswa Universitas

Muslim Indonesia di Makasar yang luka parah akibat tindakan keras yang melampaui batas yang dilakukan oleh polisi. Anggota kepolisian yang menjadi pelaku dan kemudian terhukum adalah juga korban.

Dari sisi kepolisian, sabab-musabab munculnya bencana itu dapat diusut dengan meneliti prosesnya sejak jauh ke belakang mulai dari penerimaan calon polisi, pendidikannya, penugasan dan pembinaannya. Saat ini untuk menjadi anggota polisi pemula seorang calon harus mengeluarkan uang siluman sekitar Rp 50 juta dan untuk jenjang di atasnya jauh lebih besar lagi. Sekarang ini gencar dilakukan penerimaan dan pendidikan pembentukan polisi menuju tingkat keseimbangan yang proporsional antara jumlah penduduk dan jumlah polisi. Jika untuk menjadi polisi harus melalui proses pemerasan, maka yang akan hadir di tengah rakyat hanyalah sejumlah polisi baru yang sudah terkontaminasi penyakit.

Tindakan pemerasan dalam proses penerimaan calon polisi itu memang tidak menjadi obyek pemeriksaan BPK RI, karena focus BPK RI adalah anggaran. Akan tetapi, pemerasan tersebut perlu mendapat perhatian juga, karena hal itu dapat berujung kepada pelaksanaan pemeliharaan keamanan rakyat yang dibiayai oleh anggaran negara yang kurang efektif dan boros. \*\*\*

